

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Timur Tengah merupakan daerah kawasan antara dua titik ekstrem, yaitu Semenanjung Arab, Mesopotamia, dan Persia dan wilayah Asia Tengah (Padjadjaran, 2020). Qatar adalah salah satu negara di Timur Tengah yang hanya berbatasan darat dengan Arab Saudi sisanya berbatasan dengan Teluk Persia.



Gambar 1 Peta Qatar (Pars Today, 2018)

Jika dilihat dari sejarah, Qatar merupakan salah satu kawasan miskin di Teluk. Awalnya ekonomi Qatar berfokus pada segi perikanan dan mutiara karena sebagian besar batas dari negara Qatar yaitu lautan. Namun industri mutiara jatuh setelah munculnya pesaing dalam bidang industri mutiara yang dibudidayakan oleh Jepang sekitar tahun 1920 hingga 1930 yang menyebabkan Qatar harus mencari pemasukan lain.

Tak lama dari munculnya pesaing dari Jepang tahun 1940, Qatar menemukan salah satu cadangan gas alam cair atau *Liquefied Natural Gas* (LNG) terbesar di dunia, yaitu minyak yang sampai saat ini masih menjadi tumpuan utama Qatar sebagai penghasil utama negara. Negara Qatar berubah signifikan menjadi negara produsen minyak dunia setelah ditemukannya gas alam cair di kawasannya (Susilo, 2017).

Qatar menjadi salah satu eksportir LNG terbesar di dunia. Penerimaan ini memungkinkan pemerintah memberikan layanan biaya pendidikan, kesehatan, air dan listrik secara gratis dan bantuan perumahan untuk rakyat. Qatar memungkinkan melakukan ekspansi bisnis dan investasi di luar negeri dengan pendapatan yang melimpah. Di Doha, perubahan ini setidaknya terasa yang tak ubahnya mirip dengan kawasan pembangunan yang dimana bangunan lama dirobohkan untuk digantikan dengan bangunan baru (Susilo, 2017).

Akan tetapi Qatar yang memiliki kedekatan dengan Iran masih dianggap sebagai negara yang berbahaya bagi negara Arab Saudi, Qatar mendapat sanksi berupa embargo ekonomi dari Arab Saudi dan negara-negara Teluk Arab. Pemberian sanksi berupa larangan adanya pengiriman barang dari dalam negeri maupun pemasukan barang dari luar negeri tertentu ke negara yang tidak sejalan dengan kebijakan internasional dengan tujuan untuk merubah kebijakan suatu negara tersebut, atau yang disebut dengan embargo ekonomi. Embargo ekonomi merupakan sanksi terhadap suatu negara dengan larangan ekspor atau impor komoditas tertentu masuk ke negara tersebut yang tidak sejalan dengan kebijakan internasional dengan maksud untuk merubah kebijakannya (Tumanggor & Arifin, 2019).

Dengan dijatuhkannya sanksi dari negara-negara teluk Arab, Qatar mengalami beberapa dampak. Pertama dalam hal minyak, Qatar mengalami penurunan sebesar 8 persen dari Juni-Juli 2017. Kedua, dalam penembangan komersil, terdapat penurunan hingga sekitar $\frac{1}{2}$ persen dari total penerbangan awal yaitu 80 penerbangan setiap hari di Qatar. Ketiga, dalam bidang pelayaran, adanya penutupan jalur pelayaran atau dermaga Uni Emirat Arab yakni Fujairah dan Jebel Ali yang menjadi tempat transit dan distribusi dagang Qatar (Tumanggor & Arifin, 2019). Dalam hal ini, Qatar melakukan beberapa strategi untuk mengatasi embargo ekonomi terhadap negara-negara Teluk Arab hingga akhirnya embargo tersebut di cabut. Tidak seperti halnya Qatar yang cepat mengatasi embargo ekonomi yang dihadapi dengan waktu yang lebih singkat, ada beberapa negara yang sulit mengatasi bahkan bertahun-tahun masih di embargo ekonomi.

Pertama, sudah hampir 40 tahun Iran mengalami tekanan embargo ekonomi dari Amerika Serikat dan sekutunya dari negara-negara Barat yang tercatat Iran pertama kali dijatuhi sanksi ekonomi pada 1980. Sanksi ini diberikan karena dianggap bersikeras mengembangkan program nuklir. Embargo berlanjut saat AS dipimpin Presiden Bill Clinton menambah rangkaian sanksi pada Iran, dengan menghentikan perdagangan dan melarang investasi perusahaan-perusahaan AS di Iran. Arah perbaikan hubungan Iran sempat menuju membaik akan tetapi setelah Donald Trump meraih kemenangan dalam pemilihan Presiden AS lebih suram dari tahun-tahun sebelumnya, Akibat rentetan embargo yang kembali diberlakukan, pertumbuhan ekonomi merosot hingga menjadi 3,7 persen pada tahun 2017. Tambahan sanksi ekonomi memicu krisis ekonomi dan sempat membuat negara itu dilanda demo besar-besaran pada November 2019 (Idris, 2020).

Sebagai imbas sanksi baru, berdasarkan catatan International Monetary Fund (IMF), GDP Iran menyusut sampai sekitar 4,8 persen pada 2018 dan diperkirakan kembali menyusut hingga 9,5 persen pada 2019. IMF memperkirakan, pertumbuhan ekonomi Iran bahkan menyentuh nol persen pada 2020. Kebijakan Trump ini membuat Iran kehilangan pemasukan hingga miliaran dollar AS. Kondisi lebih parah, yakni saat pelanggaran enam bulan dari AS berakhir, membuat negara itu makin kesulitan menjual minyaknya (Idris, 2020).

Kedua ada negara Suriah yang juga diperpanjang tindakan pembatasan oleh Uni Eropa hingga 1 Juni 2023, mengingat penindasan yang berkelanjutan terhadap penduduk sipil di negara itu. Sanksi awal diberlakukan terhadap Suriah pada tahun 2011, sebagai tanggapan atas penindasan kekerasan terhadap penduduk sipil. Mereka juga menargetkan perusahaan dan pebisnis terkemuka yang diuntungkan dari hubungan mereka dengan rezim dan ekonomi perang. Langkah-langkah pembatasan juga mencakup larangan impor minyak, pembatasan investasi tertentu, pembekuan aset Bank Sentral Suriah yang disimpan di Uni Eropa, dan pembatasan ekspor peralatan dan teknologi yang mungkin digunakan untuk represi internal, serta pembatasan ekspor. pada peralatan dan teknologi untuk pemantauan atau penyadapan komunikasi internet atau telepon (Lenzu, 2022).

Ketiga yaitu Kuba, selama serangkaian konflik bersenjata antara militer Kuba dan gerilyawan yang dipimpin oleh Fidel Castro, Amerika Serikat memberlakukan embargo perdagangan pertama. Embargo awal ini melarang penjualan senjata ke Kuba melalui Perjanjian Rio 1947, yang hanya mengizinkan penjualan senjata ke negara-negara Amerika

Latin karena senjata tersebut tidak digunakan untuk tujuan permusuhan. Secara ekonomi, pemerintahan Trump masih memutuskan semua hubungan dan mengubah sanksi pada 2017 karena faktanya bahwa pemerintahan negara tidak dipilih secara demokratis. Kuba adalah negara yang sangat kecil dengan sedikit sumber daya alam yang dimilikinya sehingga membutuhkan mitra dagang yang lebih besar untuk tetap bertahan (Mercado, 2021).

Menurut pemerintah Kuba, biaya sanksi berjumlah total 933 miliar Dolar AS (USD) selama periode 60 tahun pemeliharaannya hingga 2018. Lanjut kerugian finansial dan ekonomi yang melumpuhkan yang disebabkan oleh sanksi, Pemerintah Kuba dan banyak peneliti internasional juga mengatakan bahwa mereka memiliki dampak negatif pada kesehatan penduduk Kuba, termasuk menjadi penyebab utama wabah penyakit, malnutrisi, kurangnya pasokan medis dan akses yang hilang ke layanan medis dan bahwa sanksi ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Mengingat dampak negatif ekonomi, sosial dan kemanusiaan yang sangat besar dari embargo terhadap penduduk Kuba, efektivitas sanksi harus terus-menerus dinilai kembali dan ditimbang terhadap yang pertama untuk memastikan proporsionalitas tindakan dan untuk membatasi penderitaan penduduk sipil yang tidak perlu. Studi terbaru menemukan bahwa embargo ekonomi sejauh ini tidak efektif sehubungan dengan tujuan ditetapkan oleh pemerintah AS (Nahrstedt, 2021).

Oleh karena itu, penulis akan menulis bagaimana Qatar dapat mengatasi embargo ekonomi oleh negara-negara Teluk Arab yang dialami selama kurang lebih dari tahun 2017 hingga awal tahun 2021.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penjelasan yang telah diuraikan sebelumnya, penulis tertarik untuk membahas, mencari dan meneliti terkait dengan strategi Qatar saat mendapatkan embargo ekonomi dari negara-negara Teluk Arab. Maka dapat dirumuskan: “Bagaimana strategi Qatar dalam mengatasi embargo ekonomi oleh negara-negara Teluk Arab?”

C. Kerangka Teoritik

Dari permasalahan yang akan dikaji, maka diperlukan teori dan konsep untuk menjawab permasalahan tersebut sekaligus dijadikan acuan sebagai landasan berpikir. Dalam hal ini penulis menggunakan konsep yang dapat dijadikan sarana eksplanasi yakni, konsep *national power* (kekuatan nasional) dengan tambahan embargo dan strategi.

1. *National Power* (Kekuatan Nasional)

Max Weber menjelaskan dalam dunia politik dibutuhkan sebuah modal yaitu kekuasaan agar dapat menguasai suatu pemerintahan, modal inilah yang kemudian disebut *National Power*. Mendefinisikan *power* sebagai salah satu aktor terpenting dalam konsep *National Power* individu yang memiliki *power* dapat memberikan pengaruh atau mempengaruhi tindakan individu lain selaras dengan seperti yang dikatakan oleh Morgenthau, “manusia dapat mengendalikan hati dan tindakan dari manusia lain”. Hal tersebut bisa berlaku dalam politik luar negeri, negara yang mempunyai *national power* dapat mempengaruhi kebijakan politik negara lain sehingga, pemikiran tersebut membuat *power* masuk kepada tiga aspek dasar dalam Hubungan

Internasional. Menurut Morgenthau, *national power* adalah hasil pemikiran berdasarkan penelitian antar negara berdasarkan kekuatan nasional untuk mengadakan hubungan internasional berupa kerjasama maupun konflik antar negara (Fadzri, 2017).

Kekuatan nasional pada dasarnya memiliki kecenderungan ke arah ekspansi dan pembangunan serta semua bangsa berusaha untuk meningkatkan kekuatan nasional mereka juga. Dapat dilihat tidak ada negara yang tidak berusaha melakukan peningkatan tingkat kekuatan alamnya dan meningkatkan posisinya dalam sistem internasional. Sama seperti halnya manusia, negara memiliki kompetisi dalam mendapatkan lebih banyak kekuatan dan berusaha mendapatkan kapabilitas, peluang, dan kapasitas baru. Selain dapat diwujudkan sebagai tujuan nasional, hal itu juga dapat digunakan sebagai alat oleh pemerintah dan pemimpin politik untuk mendapatkan, mempertahankan dan mengembangkan tujuan nasional (Zarghani, 2010).

Kekuatan nasional adalah alat yang digunakan oleh pemerintah dan pemimpin politik untuk mencapai tujuan dan keamanan nasional. Dalam strategi nasional itulah pola kekuasaan nasional yang paling efisien ditentukan oleh para pemimpin politik. Di sisi lain, kekuatan nasional bergantung padanya. Karena itu, keharusan keberadaan suatu negara dan bangsa serta keberhasilannya menuntut bangsa dan pemerintah selalu berusaha untuk memelihara dan mengembangkan kekuatan nasionalnya sebagai kekuatan nasional yang mana merupakan faktor eksistensi dan kesuksesan suatu bangsa (Zarghani, 2010).

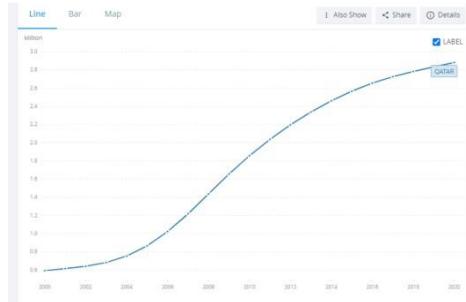
Menurut Joshua S. Goldstein dalam karyanya yang berjudul “*International Relations*” menyatakan *power* yang bersifat *tangible* antara lain; populasi, teritori, kekuatan militer, tingkat teknologi, ekonomi (melalui GDP). Sedangkan *power* yang bersifat intangible antara lain; *national will*, *diplomatic skill*, *popular support for the government* (Hartono).

Terdapat elemen-elemen kekuatan nasional yang dibagi menjadi dua kategori, yaitu:

1. Kekuatan Berwujud (*Tangible Power*)

Kekuatan berwujud adalah jenis kekuatan yang bisa disentuh, dilihat, diraba oleh orang, misalnya:

a. Populasi



Gambar 2 Kurva Populasi Qatar
(The World Bank, n.d.)

Dilihat dari kurva di atas, populasi penduduk di Qatar setiap tahunnya selalu memiliki peningkatan. Di tahun 2016 berjumlah 2,654,379 populasi. Di tahun 2017 berjumlah 2,724,727 populasi. Di tahun 2018

berjumlah 2,781,682 populasi. Hingga di tahun 2020 berjumlah 2,881,060 populasi (The World Bank, n.d.).

b. Wilayah

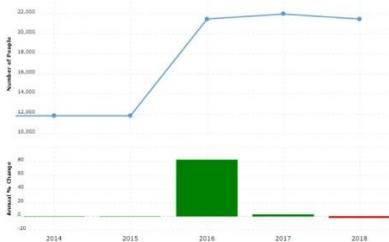
Timur Tengah dan Eropa Kontinental telah menjadi zona potensial persaingan kekuasaan karena letak geografis dan strategisnya. Oleh karena itu, letak geografis yang menguntungkan antaranya dapat membantu suatu negara menjadi kuat.

Seperti halnya Qatar, walau memiliki wilayah darat yang hanya berbatasan dengan Arab Saudi dan sisanya berbatasan dengan lautan, Qatar memiliki letak strategis yang dimana wilayah mereka memiliki sejumlah gas alam terbesar yang menjadikan tempat penghasil utama negara Qatar hingga saat ini.

c. Kekuatan militer

Kekuatan militer merupakan salah satu bagian vital dari kekuatan nasional suatu negara dalam memajukan kepentingan nasional dan mempengaruhi tingkat keberhasilan politik luar negeri. Kekuatan militer merupakan bagian penting dari kekuatan nasional yang berkontribusi pada kekuatan dan efektivitasnya.

Qatar merupakan salah satu negara di Timur Tengah yang memiliki kekuatan militer yang besar. Qatar memiliki tentara aktif sebanyak 12.000 tentara, 98 jet tempur, 80 kapal perang, 92 tank dan anggaran pertahanan US\$ 1,93 miliar setahun. Tentara Qatar sendiri dilatih oleh Perancis, Inggris dan Amerika Serikat (Assegaf, 2017).



Gambar 3 Kurva Jumlah Militer Qatar Tahun 2014-2018 (Macro Trends , 2022)

Di atas merupakan kurva jumlah militer Qatar dari tahun 2014 hingga 2018. Jumlah militer Qatar untuk tahun 2015 adalah 11.800,00, meningkat 0% dari tahun 2014. Jumlah militer Qatar untuk tahun 2016 adalah 21.500,00, meningkat 82,2% dari tahun 2015. Jumlah militer Qatar untuk tahun 2016 adalah 21.500,00, meningkat 82,2% dari tahun 2015. Jumlah militer Qatar untuk tahun 2017 adalah 22.000,00, meningkat 2,33% dari 2016. Jumlah militer Qatar untuk tahun 2018 adalah 21.500,00, turun 2,27% dari tahun 2017 karena awal dari dijatuhkannya embargo ekonomi yang diterima oleh Qatar (Macro Trends , 2022).

d. Ekonomi

Seperti yang diketahui, Qatar menggunakan ekonomi sumber daya alam nya sebagai pendapatan utama bagi negara. Qatar memiliki sumber daya alam yaitu gas alam cair

yang melimpah dan menjadi salah satu eksportir terbesar di dunia.

Ekspor utama yaitu gas alam dan minyak bumi. Produksi minyak bumi 1.1 juta bpd dan Qatar berhasil menjadi negara pengekspor LNG terbesar di dunia yakni sebesar 77 juta metric ton (Kemlu, 2018).

Simpanan minyak negara ini diperkirakan sebesar 25.2 miliar barel (2,4 km³). meskipun apabila dibandingkan dengan negara-negara di Timur Tengah yang masuk kedalam anggota OPEC, Qatar bukanlah negara yang memiliki cadangan minyak terbesar, namun dengan jumlah cadangan minyak 25.2 miliar barel (2,4 km³) ditambah lagi dengan cadangan gas yang sangat besar yang menempatkan Qatar menjadi negara ketiga terbesar dalam cadangan gas setelah Iran dan Rusia (Sahilna, 2018).

2. Kekuatan Tak Berwujud (*Intangible Power*)

Kekuatan tak berwujud adalah kekuatan yang tidak bisa dilihat maupun disentuh, misalnya:

a. Ideologi

Qatar menganut ideologi theokrasi yang dimana sistem pemerintahan negaranya antara politik dengan agama disatukan. Hal ini juga mengacu pada mayoritas penduduk Qatar bersuku Sunni, Ahlul-Sunnah atau Sunni adalah kelompok besar yang senantiasa tegak di atas agama islam berdasarkan Al-Quran dan hadist yang shahih dengan pemahaman para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in (Jatmika, 2016).

b. Kepemimpinan

Otoritas Legislatif akan dipegang oleh Dewan Al-Shoura. Otoritas Eksekutif akan dipegang oleh Amir dan dia akan dibantu oleh Dewan Menteri. Amir adalah Kepala Negara. Pribadinya tidak dapat diganggu gugat dan dia harus dihormati oleh semua orang. Amir adalah Panglima Angkatan Bersenjata. Dia akan mengawasi hal yang sama dengan bantuan Dewan Pertahanan, yang diatur di bawah otoritas langsungnya. Amir harus mewakili Negara secara internal dan eksternal dan dalam semua hubungan internasional (Ministry of Foreign Affairs, 2022).

HH Sheikh Tamim Bin Hamad Al-Thani merupakan kepala negara Qatar saat ini. Beliau lahir pada 3 Juni 1980. HH Amir menerima ijazah SMA dari Sherborne School di Inggris pada tahun 1997 dan lulus dari Akademi Militer Kerajaan Sandhurst di Inggris pada tahun 1998. Ia diangkat sebagai Pewaris Qatar pada tanggal 5 Agustus 2003, dan menjadi Amir Qatar pada tanggal 25 Juni 2013 (Ministry of Foreign Affairs, 2022).

c. Pendidikan

Qatar menghabiskan banyak uang untuk pendidikan negaranya bahkan salah satu pengeluaran per murid tertinggi di dunia. Pendidikan gratis tetapi tidak wajib bagi semua warga negara berusia antara 6 dan 16 tahun. Kelas dipisahkan berdasarkan jenis kelamin. Sistemnya telah berkembang pesat. Minat untuk mendirikan Qatar sebagai pusat penelitian regional utama menyebabkan berdirinya Education City, fasilitas multi-

universitas yang terletak di pinggiran Doha. Pada awal abad ke-21 beberapa institusi Amerika memiliki cabang di Education City, termasuk Virginia Commonwealth University, Weill Cornell Medical College (bagian dari Cornell University), Carnegie Mellon University, Texas A&M University, Northwestern University, dan Georgetown University. Universitas tersebut menawarkan program-program seperti studi pra-medis dan medis, administrasi bisnis, kimia, listrik, dan teknik mesin, jurnalisme, dan seni rupa (Britannica, n.d.).

d. Keterampilan Diplomasi

Diplomasi adalah suatu sistem komunikasi antar bangsa-bangsa, dengan melalui sistem komunikasi seperti ini, maka negara-negara dapat mengekspresikan dan mempertahankan kepentingan-kepentingan nasionalnya. Diplomasi sebagai sarana di mana masalah-masalah yang kiranya timbul dalam rangkaian hubungan antar negara dapat di pecahkan dengan negosiasi. Selain itu, diplomasi dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang dilakukan oleh dua atau lebih negara-negara yakni dalam bentuk perselisihan-perselisihan, konflik-konflik, pertikaian-pertikaian, ataupun dalam suatu konflik (Sitepu, 2011).

Tujuan diplomasi bagi setiap negara adalah pengamanan kepentingan nasional, kebebasan politik dan integritas territorial. Fungsi utama dari pelaksanaan diplomasi

adalah negosiasi dan ruang lingkup diplomasi adalah menyelesaikan perbedaan dan menjamin kepentingan negara melalui negosiasi yang sukses, apabila negosiasi gagal perang merupakan bagian dari sarana diplomasi (Prayuda & Sundari, 2019).

Kebijakan luar negeri Qatar didasarkan pada seperangkat prinsip yang digariskan dalam konstitusinya. Prinsip-prinsip ini termasuk memperkuat perdamaian dan keamanan internasional dengan mendorong penyelesaian sengketa internasional secara damai.

Kebijakan luar negeri Qatar menghormati dan menghormati semua perjanjian dan konvensi internasional yang menjadi salah satu pihak. Prioritasnya dalam kebijakan luar negeri meliputi:

- a. Mediasi perselisihan antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai resolusi damai,
- b. Mempromosikan pembangunan berkelanjutan,
- c. Mengurangi diskriminasi terhadap perempuan dan agama minoritas,
- d. Memperkuat bantuan kemanusiaan di wilayah konflik dan perang,
- e. Mendukung dan memperkuat upaya untuk mengurangi kebutuhan kemanusiaan yang diantisipasi dalam keadaan darurat yang kompleks.

Qatar percaya dalam membangun aliansi dan menemukan solusi untuk konflik melalui dialog dan mediasi, sambil menghormati hak-hak negara berdaulat (Government Communications Office, 2022).

Dalam masalah yang sedang dihadapi Qatar, Qatar telah mendesain ulang strategi yang diimplementasikan melalui politik luar negeri untuk melakukan diplomasi pintu terbuka yang dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ketersediaan pasokan pangan untuk menstabilkan kebutuhan domestik. Qatar mencoba meningkatkan efektivitas hubungan diplomatik dengan pemerintah Iran dan Turki sebagai bagian dari solusi jangka pendek untuk menstabilkan negara selama krisis (Saanun, 2018).

2. Embargo

Dalam perniagaan dan politik internasional, embargo merupakan pelarangan perniagaan dan perdagangan oleh sebuah negara. Embargo biasanya dinyatakan oleh sekelompok negara kepada negara lain agar mengisolasi dan membuat negara tersebut dalam keadaan sulit secara internal negaranya. Pada umumnya, embargo digunakan sebagai hukuman politik bagi pelanggaran yang dilakukan terhadap sebuah kebijakan atau kesepakatan. Mengendalikan dan mempengaruhi tingkah laku dan pikiran negara lain menjadi salah satu tujuan dilakukannya embargo. Salah satu yang perlu digaris bawahi adalah bahwa embargo nyaris tidak dapat digunakan oleh negara yang tidak memiliki basis ekonomi yang kuat, sehingga sejumlah syarat harus dimiliki,

yaitu pertama *financial power*; kedua *political will* (kemauan untuk menggunakan kekuatan ekonomi); ketiga *skill in applications* (keterampilan dalam menggunakannya) dan yang keempat reputasi dalam menggunakannya (Pramono, 2014).

Embargo memiliki tiga jenis. Pertama, Embargo Perdagangan, adalah melarang ekspor barang atau jasa tertentu. Kedua, Embargo Strategis, hanya melarang penjualan barang atau jasa terkait militer. Terakhir Embargo Sanitasi, yang diberlakukan untuk melindungi manusia, hewan, dan tumbuhan. Embargo sendiri merupakan hambatan perdagangan yang ditegakkan secara hukum. Dalam kebijakan luar negeri, embargo biasanya merupakan hasil dari ketegangan hubungan diplomatik, ekonomi atau politik antara negara-negara yang terlibat (Ramadhani, 2020).

Dalam hal ini, Qatar mengalami permasalahan dalam embargo perdagangan, yang mana keputusan rute penerbangan perdagangan, dilarang melakukan ekspor maupun impor ke berbagai Kawasan di Timur Tengah, khususnya ke negara-negara Teluk Arab yang menjatuhkan sanksi tersebut.

3. Strategi

Di suatu negara, strategi adalah seni dari para pemimpin politik suatu negara untuk melihat kapabilitas, kesanggupan, dan tingkat kekuatan nasional, di satu sisi, dan memandang nasional kepentingan dan tujuan di sisi lain. Mereka kemudian perlu mengadopsi kebijakan untuk mencapainya tujuan dan kepentingan nasional dengan menggunakan tingkat kekuatan nasional mereka (Zarghani, 2010).

Qatar dengan ibukota di Doha memiliki luas wilayah 11.437 Km² (mencakup pulau-pulau terluar) dengan batas wilayah dibagian utara, timur dan barat yaitu Teluk Persia serta bagian selatan berbatasan dengan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab. (Kemlu, 2018). Qatar memiliki iklim kering, musim dingin yang sejuk dan menyenangkan, musim panas yang sangat panas dan lembab dengan sebagian besar gurun pasir dan tandus. Sebagian besar penduduknya berkerumun di atau sekitar ibu kota Doha di sisi timur Semenanjung, Semenanjung menempati lokasi yang strategis di tengah Teluk Persia dekat deposit minyak bumi utama (The World Factbook, 2021) yang merupakan wilayah yang sangat menguntungkan bagi Qatar dalam perekonomian pemerintahnya.

Pada tahun 2015, Qatar memiliki GDP sebanyak 164 miliar dengan income perkapita US\$ 140.649. Cadangan minyak bumi 25 milyar barrels dan cadangan gas 900 triliun cubic feet (menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia setelah Iran dan Rusia). Ekspor utama Qatar adalah gas alam dan minyak bumi dengan produksi minyak bumi 1.1 juta bpd dan Qatar berhasil menjadi negara pengeksport LNG terbesar di dunia yakni sebesar 77 juta metric ton (Kemlu, 2018).

Menurut peneliti Al-Jazeera Center for Studies (AJCS) Jamal Abdullah, pemutusan hubungan diplomatik antara Qatar dan Arab Saudi beserta empat negara sekutunya dipengaruhi oleh perebutan pengaruh antara Saudi dan Qatar. Tidak seperti negara-negara kecil di Teluk lainnya, Qatar tidak mencari perlindungan kepada Arab Saudi melainkan membangun kekuatan sendiri dengan menjadi hubungan kerjasama ke berbagai negara, khususnya ke Iran yang dimana Arab Saudi menjadikan Iran musuhnya.

Qatar yang merupakan salah satu negara di Kawasan Timur Tengah memiliki pendidikan dan kesehatan terbaik, mereka merapikan secara total dalam hal pendidikan, seperti

kurikulum setara dengan standar internasional dan pembangunan *education city*. *Education city* adalah sebuah kawasan yang mana sekolah, universitas, atau lembaga riset berkumpul dalam satu tempat yang dilengkapi oleh teknologi-teknologi canggih dan modern. Banyak beasiswa yang tersedia, baik beasiswa dari universitas maupun beasiswa yang dikelola oleh lembaga nirlaba, seperti Qatar Foundation (sasbar.fib.ugm, 2020).

D. Hipotesa

Pada tahun 2017 bulan April, Qatar telah menjalin kesepakatan dengan kelompok militan Sunni dan Syiah di Irak dan Suriah. Kemudian pada bulan Juni 2017, Arab Saudi memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Qatar karena Qatar membangun aliansi dengan Iran dan menerima mantan anggota ikhwanul muslimin sebagai anggota politik mereka. Dalam konflik ini, Arab Saudi tidak hanya memutuskan hubungan diplomatiknya saja, melainkan juga melakukan blokade kepada Qatar dengan menutup penerbangan baik dari Qatar ke Arab Saudi maupun sebaliknya, menutup perbatasan darat, laut dan udara hingga meluas ke Kawasan Teluk Arab lainnya. Hingga akhirnya selama hampir 3 tahun berlalu, Arab Saudi mencabut embargo ekonomi yang diterima oleh Qatar pada tanggal 5 Januari 2021 di Konferensi Tingkat Tinggi negara-negara teuk Arab yang dilaksanakan di kota kuno Arab audi, Al-la dan dipimpin oleh raja Arab Saudi, Raja Salman.

Berdasarkan permasalahan di atas dan dengan bantuan konsep untuk membantu menganalisis, penulis mengambil hipotesis yaitu Strategi Qatar dalam mengatasi embargo ekonomi oleh negara-negara Teluk Arab dengan cara:

h.1 Memaksimalkan Kekuatan Ekonomi dalam Negeri

Qatar memiliki kekuatan ekonomi dalam hal sumber daya alam yang melimpah berupa gas alam cair hingga investasi di berbagai dunia, antara lain di Eropa dan Kawasan Asia.

h.2 Memaksimalkan Skill of Diplomacy

Qatar melakukan berbagai kerjasama dengan negara-negara kawan berupa kerjasama militer ekonomi, hingga terdapat beberapa negara kawan yang membantu berupa bahan pangan selama embargo ekonomi yang diterima oleh Qatar.

Qatar melakukan strategi tersebut agar pendapatan pemerintah mereka tidak menurun dengan drastis dan dapat mencabut embargo ekonomi tersebut.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk memahami terhadap gejala dan fakta berdasarkan sudut pandang subjek yang diteliti dan diamati (Hardani, Auliya, Andriani, Fandani, & dkk, 2020). Metode ini menggunakan sumber data pengkajian isi dokumen yang mana merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan melihat dan memanfaatkan catatan, arsip, gambar, film, foto, serta dokumen-dokumen lainnya. Dokumen itu adalah termasuk catatan penting yang berhubungan dengan masalah, yang dapat diperolehnya data secara lengkap, sah, dan bukan berdasarkan perkiraan saja (Gumawan, 2015).

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian ini meliputi tahun 2017 pada peristiwa Arab Saudi melakukan embargo ekonomi kepada

Qatar hingga tahun 2021 dalam pencabutan embargo ekonomi. Penelitian ini menilik dari aspek kebijakan luar negeri kekuatan nasional Qatar dalam menghadapi embargo ekonomi pasca tahun 2017.

G. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis secara umum bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana strategi yang dilakukan Qatar saat mengatasi embargo oleh negara-negara Teluk Arab. Penelitian ini juga bertujuan untuk sarana pembuktian penulis dalam mengimplementasikan ilmu-ilmu yang telah di dapat selama proses perkuliahan melalui aplikasi teori dalam penelitian ini.

H. Sistematika Penulisan

Bab I, menjelaskan secara garis besar penelitian antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teoritik, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, tujuan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II, membahas tentang proses awal mula terjadinya embargo ekonomi yang diterima oleh Qatar dari negara Arab hingga membahas mengenai perluasan negara-negara yang ikut melakukan embargo ekonomi untuk Qatar.

Bab III, penulis menjelaskan mengenai jawaban hipotesa pertama yang mana Qatar memaksimalkan kekuatan ekonomi dalam negeri untuk mengatasi embargo ekonomi.

Bab IV, menjelaskan jawaban hipotesa kedua yang mana Qatar memaksimalkan *Skill of Diplomacy* yang dimiliki oleh Qatar.

Bab V, dalam bab ini berisi kesimpulan penelitian.